

**TRANSPARANSI PROGRAM *ELECTRONIC AUCTION***  
**DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**  
**SURABAYA**

**Astrid Pamela Cholifah**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
astrdpamella@gmail.com

**Eva Hany Fanida, S. AP., M. AP.**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
efanida@yahoo.com

**Abstrak**

Salah satu pelayanan publik yang diberikan pemerintah adalah Program Electronic Auction yang merupakan inovasi layanan yang diluncurkan oleh Direktorat Jendral Kekayaan Negara yang bertujuan untuk mempermudah para peserta lelang agar dapat mengikuti lelang melalui internet dimanapun mereka berada. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet, Electronic Auction dapat memberikan kemudahan bagi para peserta lelang dengan mengikuti lelang tanpa perlu hadir ditempat lelang secara langsung. Secara resmi, DJKN meluncurkan program ini pada tahun 2014 yang akan dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di seluruh Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan kuantitatif dan datanya yang disuguhkan berupa angka. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh melalui penyebaran angket atau kuesioner. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan pengolahan data, pengorganisasian, dan penemuan hasil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat transparansi program Electronic Auction di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program ini telah mencapai tingkat transparansi yang baik dengan presentase sebesar 66,7%. Dengan tingkat keterbukaan yang baik, peraturan dan prosedur pelayanan yang dengan mudah dapat dipahami oleh para pengguna dan stakeholder, dan informasi yang mudah diakses dari berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan Electronic Auction membuat program ini dapat dikatakan transparan oleh para penggunanya. KPKNL Surabaya perlu untuk terus meningkatkan penerapan prinsip transparansinya pada program ini agar dapat mencapai kategori transparansi yang maksimal dan agar dampak dari tujuan program ini dapat dirasakan secara langsung dan menyeluruh oleh masyarakat.

**Kata Kunci:** Transparansi, Lelang, Pelayanan

**Abstract**

One of the public services provided by the government is the Electronic Auction Program, which is a service innovation launched by the Directorate General of State Wealth which aims to make it easier for bidders to be able to participate in the auction through the internet wherever they are. Based on the Minister of Finance

Regulation Number 90/PMK.06/2016 concerning Guidelines for Implementing Auctions with Written Offers Without Attendance by Bidder Through the Internet, Electronic Auction can provide convenience for auction participants by participating in auctions without the need to be present in the auction place directly. Officially, the DJKN launched this program in 2014 which will be carried out by the State Wealth Service Office and Auctions throughout Indonesia. This research uses a type of research with a quantitative approach and the data is presented in the form of numbers. Primary data sources in this study were obtained through questionnaires or questionnaires. The data analysis technique in this study is data processing, organizing, and finding results. The purpose of this study was to find out how much the transparency of the Electronic Auction program at the Surabaya State Wealth and Auction Service Office. The results of this study indicate that this program has achieved a good level of transparency with a percentage of 66.7%. With a good level of openness, regulations and service procedures that can easily be understood by users and stakeholders, and information that is easily accessible from various aspects of organizing Electronic Auction services makes this program transparent by its users. KPKNL Surabaya needs to continue to improve the implementation of its transparency principle in this program in order to achieve a maximum category of transparency and so that the impact of the program objectives can be felt directly and thoroughly by the community.

**Keywords:** Transparency, Auction, Service

## PENDAHULUAN

Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu isu sentral yang gencar diperbincangkan dalam pengelolaan administrasi publik saat ini. Seiring dengan meningkatnya pengetahuan dan pendidikan di Indonesia serta pengaruh yang kuat dari globalisasi, masyarakat gencar mengajukan tuntutan kepada pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Pola lama penyelenggaraan pemerintahan sudah tidak sesuai dengan tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu, sudah seharusnya tuntutan dari masyarakat ini direspon baik oleh pemerintah dengan mengadakan perubahan secara terarah demi terwujudnya konsep penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Pengetahuan masyarakat yang terus meningkat di era globalisasi ini memunculkan masyarakat yang kritis sehingga terus menuntut pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Menurut Hari Sabarno (2007), salah satu aspek dasar dalam pencapaian *good governance* adalah transparansi. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan

berbagai indikator lainnya. Sehingga prinsip transparansi menjadi salah satu prinsip penting yang harus diwujudkan dalam kaitannya dengan penerapan praktik *good governance*.

Namun pada nyatanya, pemerintah masih belum sepenuhnya mampu dalam menerapkan prinsip dasar tersebut karena dalam prosesnya masih terdapat banyak permasalahan yang muncul dalam praktik penyelenggaraan pelayanan publik yaitu patologi birokrasi seperti KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Hal tersebut dibuktikan dari hasil survei *Political Economy Risk Consultancy* (PERC) yang mencatat bahwa Indonesia menempati peringkat ketiga dengan tingkat korupsi paling tinggi se Asia, Australia dan US pada tahun 2018. Hal tersebut menunjukkan bahwa prinsip dasar dari konsep *good governance* publik belum belum terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik, memiliki keharusan untuk melakukan perbaikan dalam hal pelayanan publik seiring dengan tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya keterbukaan atau transparansi dalam berbagai kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Salah satunya yaitu dengan mewujudkan keterbukaan informasi secara menyeluruh oleh setiap unit instansi pemerintah.

Berdasarkan hasil laporan tahunan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) tahun periode 2017, proses pengadaan barang dan jasa sektor publik menjadi titik rawan korupsi di Indonesia. Salah satunya adalah pada kegiatan lelang barang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Banyaknya mafia-mafia lelang yang bertebaran menyebabkan harga lelang aset negara menjadi tidak maksimal dan akan membawa kerugian bagi negara jika terjadi secara konstan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kemudian meluncurkan produk layanan unggulan lelang online yang dijuluki *e-Auction* pada 7 November 2014. Peluncuran *e-Auction* atau lelang internet ini merupakan bentuk modernisasi lelang yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 106 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. *e-Auction* merupakan aplikasi berbasis internet yang dapat diakses melalui browser pada alamat <https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id>. Program *e-Auction* ini bertujuan untuk mengurangi berbagai kemungkinan kecurangan dalam lelang aset negara. Selain itu program ini juga bertujuan untuk membuat proses lelang yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) menjadi lebih mudah untuk diakses dimanapun dan kapanpun dengan komputer atau *gadget*.

Dalam prosesnya, program *e-Auction* awalnya diterapkan di beberapa KPKNL yang memiliki predikat unggul di Indonesia salah satunya adalah KPKNL Surabaya. KPKNL Surabaya adalah salah satu kantor pelayanan publik yang merupakan unit vertikal daerah di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). KPKNL Surabaya merupakan instansi memiliki predikat unggul, hal tersebut dibuktikan pada akhir tahun 2013 lalu, Kantor Pusat DJKN telah mengusulkan KPKNL Surabaya sebagai unit kerja berpredikat Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) dalam rangka pelaksanaan program pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM. Kemudian pada tahun 2014, KPKNL Surabaya resmi dinobatkan sebagai unit

kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). KPKNL Surabaya terpilih sebagai salah satu kantor percontohan karena dinilai memiliki dedikasi dalam peningkatan mutu pelayanan publik melalui layanan unggulannya antara lain sistem layanan lelang *lock* dan sistem lelang Tromol Pos. Diraihnya predikat WBK tersebut membuat KPKNL Surabaya menjadi salah satu pioner program *e-Auction* bersama dengan beberapa KPKNL di Jakarta serta Medan sebelum akhirnya program tersebut dilaksanakan oleh seluruh KPKNL Di Indonesia.

Dengan berdasarkan pernyataan di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai transparansi program *e-Auction* di KPKNL Surabaya dengan judul “**Transparansi Program Electronic Auction Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya.**” yang akan diukur menggunakan teori prinsip transparansi dari Dwiyanto (2006) yang terdiri dari pengukuran tingkat keterbukaan, kemudahan peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna dan *stakeholder* yang lain, dan kemudahan untuk memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik.

## METODE

Jenis Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya yang merupakan unit kerja berpredikat WBK dan menjadi salah satu KPKNL percontohan karena dinilai memiliki dedikasi dalam peningkatan mutu pelayanan publik. Populasi dalam penelitian ini yaitu para pengguna program *e-Auction* pada bulan Januari hingga Februari tahun 2019 di KPKNL Surabaya yaitu sebanyak 144 orang, anggota sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 59 orang. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* yang merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yaitu responden yang dianggap mengerti terkait pelaksanaan program *Electronic Auction*.

Dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui penyebaran kuesioner sementara data

sekunder diperoleh secara tidak langsung baik berupa arsip atau dokumentasi, literatur, penelitian terdahulu, dan lain sebagainya. Teknik analisis data dilakukan berdasarkan teknik analisis data dari Sugiyono (2004) yang terbagi menjadi 3 tahap yaitu pengolahan, pengorganisasian, dan penemuan hasil.

a. Pengolahan data

Proses awal pengolahan data dalam melakukan *editing* terhadap setiap data yang diterima. Tahapan selanjutnya yaitu memasukkan data ke dalam tabel frekuensi untuk memperjelas kategori atau klasifikasi data. Klasifikasi data hasil kuesioner yang digunakan berdasarkan pada lima yaitu:

1. Jawaban 1 (satu) kriteria Tidak Transparan
2. Jawaban 2 (dua) kriteria Kurang Transparan
3. Jawaban 3 (tiga) kriteria Transparan
4. Jawaban 4 (empat) kriteria Sangat Transparan

b. Pengorganisasian Data

Pengorganisasian data dilakukan terhadap data yang telah disajikan dalam bentuk tabel frekuensi yang berdasarkan pada kriteria ukuran transparansi. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam pengorganisasian yang dilakukan:

1. Menghitung jumlah skor item kuesioner

Hasil kuesioner sudah dimasukkan ke dalam tabel frekuensi sesuai dengan 4 (empat) kategori yang telah ditentukan kemudian dilakukan perhitungan hasil kuesioner berdasarkan pada kelompok responden menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

2. Membuat kelas interval

No.	Interval Nilai	Kategori
1.	76% - 100%	Sangat Transparan
2.	51% - 75%	Transparan
3.	25% - 50%	Cukup Transparan
4.	0% - 25%	Kurang Transparan

3. Perhitungan skor jawaban responden

Perhitungan skor jawaban digunakan untuk mengetahui presentase jawaban masing-masing indikator dan skor hasil untuk masing-masing sub variabel. Untuk menghitung skor jawaban responden, digunakan rumus dari Sugiyono (2004), sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Skor yang diteliti}}{\text{Jumlah skor ideal (kriteria)}} \times 100\%$$

c. Penemuan Hasil

Hasil dari perhitungan jumlah skor item untuk setiap kategori dinyatakan dalam bentuk presentase pada kelas interval. Perhitungan skor item pada tiap variabel juga akan dilakukan untuk menghitung skor akhir guna menentukan kategori presentase. Nilai presentase tersebut nantinya akan dinyatakan dalam bentuk kata-kata agar lebih mudah dipahami.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Program *e-Auction* merupakan program lelang menggunakan internet atau lelang online yang diluncurkan oleh dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) pada 7 November 2014. Program *e-Auction* ini bertujuan untuk mengurangi berbagai kemungkinan kecurangan dalam lelang aset negara. Selain itu program ini juga bertujuan untuk membuat proses lelang yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) menjadi lebih mudah untuk diakses dimanapun dan kapanpun dengan komputer maupun *gadget*. Program ini juga merupakan bentuk terobosan baru yang memiliki tanggung jawab untuk

menjamin pelaksanaan lelang di KPKNL menjadi lebih transparan. Program ini diluncurkan dalam rangka menjawab tantangan efektivitas pelaksanaan tugas, peningkatan kinerja organisasi dan budaya transparansi yang berbasis hasil. Diharapkan dengan adanya program ini, pelayanan lelang terhadap masyarakat menjadi jauh lebih mudah dan dapat diakses kapan saja sesuai dengan keinginan dan tuntutan jaman saat ini, yaitu pelayanan yang cepat, mudah, efektif, dan transparan.

Sebelum adanya program *e-Auction*, DJKN juga melakukan lelang konvensional melalui internet yang dinamakan *e-Conventional*. Perbedaannya adalah jika *e-Auction* penawarannya dilakukan melalui aplikasi lelang internet secara tertulis dan tanpa kehadiran peserta lelang. Sementara, untuk *e-Conventional*, dari tahap pendaftaran hingga tahap pembayaran juga melalui aplikasi, namun untuk tahap pelaksanaannya, tetap mengharuskan kehadiran peserta di tempat lelang dengan cara penawaran baik lisan maupun tertulis.

Variabel penelitian ini menggunakan variabel tunggal yaitu variabel transparansi. Adapun untuk mengukur tingkat transparansi program *Electronic Auction* ini menggunakan tiga indikator prinsip transparansi menurut Dwiyanto (2006) yaitu pengukuran tingkat keterbukaan, kemudahan peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna dan stakeholder yang lain, dan kemudahan untuk memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Pemaparan dari hasil penelitian mengenai transparansi program *Electronic Auction* di KPKNL Surabaya menjelaskan bahwa:

**a. Pengukuran Tingkat Keterbukaan**

Indikator transparansi program *e-Auction* yang pertama adalah pengukuran tingkat keterbukaan yang terdiri dari 7 item pernyataan. Berdasarkan hasil jawaban responden menunjukkan bahwa indikator ini mendapatkan nilai tertinggi sebesar 71,6% dan nilai terendah sebesar 66,1%. Kedua nilai tersebut berada pada kriteria transparan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat keterbukaan program *e-Auction* secara keseluruhan dapat dikatakan transparan. Akumulasi dari seluruh jawaban pada indikator pengukuran tingkat keterbukaan menunjukkan bahwa

tingkat keterbukaan pada program *e-Auction* di KPKNL Surabaya mencapai presentase 68,8% yang berada pada kriteria kelas interval 51% - 75% dengan kriteria transparan. Sehingga dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan tingkat keterbukaan program *e-Auction* di KPKNL Surabaya sudah transparan.

**b. Kemudahan Peraturan dan Prosedur Pelayanan Dapat Dipahami oleh Pengguna dan Stakeholder yang Lain**

Indikator transparansi program *e-Auction* yang kedua adalah kemudahan peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna dan stakeholder yang lain yang terdiri dari 10 item pernyataan. Berdasarkan hasil jawaban responden menunjukkan bahwa indikator ini mendapatkan nilai tertinggi sebesar 76,7% dan nilai terendah sebesar 60,1%. Kedua nilai tersebut berada pada kriteria transparan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemudahan peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna dan stakeholder yang lain secara keseluruhan dapat dikatakan transparan.

Akumulasi dari seluruh jawaban pada indikator kemudahan peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna dan stakeholder yang lain menunjukkan bahwa kemudahan peraturan dan prosedur pelayanan program *e-Auction* di KPKNL Surabaya mencapai presentase 70% yang berada pada kriteria kelas interval 51% - 75% dengan kriteria transparan. Sehingga dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan kemudahan peraturan dan prosedur pelayanan program *e-Auction* di KPKNL dapat dipahami oleh pengguna dan stakeholder yang lain sudah transparan.

**c. Kemudahan Untuk Memperoleh Informasi Mengenai Berbagai Aspek Penyelenggaraan Pelayanan Publik**

Indikator transparansi program *e-Auction* yang ketiga adalah kemudahan untuk memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang terdiri dari 6 item pernyataan. Berdasarkan hasil

jawaban responden menunjukkan bahwa indikator ini mendapatkan nilai tertinggi sebesar 73,3% dan nilai terendah sebesar 60,1%. Kedua nilai tersebut berada pada kriteria transparan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemudahan untuk memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik secara keseluruhan dapat dikatakan transparan.

Akumulasi dari seluruh jawaban pada indikator kemudahan untuk memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan lelang *e-Auction* di KPKNL Surabaya mencapai presentase 69,7% yang berada pada kelas interval 51% - 75% dengan kriteria transparan. Sehingga dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan kemudahan untuk memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan lelang *e-Auction* di KPKNL Surabaya sudah transparan.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa tingkat transparansi program *Electronic Auction* di KPKNL Surabaya telah masuk pada kategori transparan dengan presentase sebesar 66,9%. Dalam penelitian ini data digolongkan dalam kelas interval dengan kategori yang telah ditentukan untuk mengetahui sejauh mana prinsip transparansi telah diterapkan dan dilaksanakan oleh KPKNL Surabaya melalui program *e-Auction*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program *Electronic Auction* telah mencapai transparansi yang baik pada masing-masing indikator. Indikator pengukuran tingkat keterbukaan mencapai presentase sebesar 68,8%, indikator kemudahan peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna dan stakeholder yang lain mencapai presentase sebesar 70% yang termasuk dalam kategori transparan, dan indikator kemudahan untuk memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik mencapai presentase sebesar 66,9% yang juga masuk dalam kriteria transparan. Sehingga secara keseluruhan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi program

*Electronic Auction* di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya telah mencapai presentase 66,7% yang termasuk dalam kriteria transparan.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran terhadap transparansi program *e-Auction* di KPKNL Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Lebih memperhatikan perawatan software yaitu yang berkaitan dengan pembaharuan sistem agar tidak mudah diretas, dapat diakses secara mudah, dan agar jaringan tetap stabil.
2. Perlunya untuk selalu mengembangkan atau memperbarui *Standart Operational Procedur* (SOP) yang ada agar program tersebut bisa semakin disempurnakan dikemudian hari. Dengan adanya SOP maka akan terjadi perubahan kualitas pelayanan ke arah yang semakin baik, transparan, dan akuntabel.
3. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya perlu untuk mengadakan sosialisasi kembali tentang program lelang *e-Auction* kepada masyarakat agar program ini lebih banyak diketahui secara luas dan agar masyarakat bisa lebih tahu bahwa siapa saja boleh dan bisa mengikuti lelang di KPKNL Surabaya.

### **Ucapan Terima Kasih**

Peneliti mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan jurnal ini diantaranya :

- a. Eva Hany Fanida, S. AP., M. AP. selaku dosen pembimbing
- b. Dra. Meirinawati, M. AP. dan Fitrotun Niswah S. AP., M. AP. selaku dosen penguji.
- c. M. Farid Ma'ruf S.Sos, M.AP. yang telah membimbing dan menelaah jurnal yang ditulis peneliti.
- d. Para dosen S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, UNESA.
- e. Dan pihak-pihak lainnya yang memberi dukungan moral maupun material kepada peneliti sehingga penulisan jurnal ini dapat terselesaikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Indrajit, Richardus Eko. 2004. *e-Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.06/2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet.
- Riduwan. 2010. *Rumus dan Data Dalam Analisis Statistika*. Bandung: Alfabeta.
- Riduwan. 2013. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sabarno, Hari. 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT. Reflika Aditama.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarni dan Wahyuni. 2006. *Metodologi Penelitian dan Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Andi.